

PENGELOLAAN POS LINTAS BATAS NEGARA (PLBN) SOTA MELALUI DIPLOMASI EKONOMI PERBATASAN SEBAGAI INSTRUMEN KEBIJAKAN PUBLIK

Jefri Iba¹, Sulafah Fathin Khannanah², Muhaimin³, Indiaty⁴, David Kasidi⁵
Universitas Waskita Dharma

jefriiba9@gmail.com¹, fathinkhannanah@gmail.com², muhaiminemha72@gmail.com³,
ini.indiaty@gmail.com⁴, dvdkasidi77@gmail.com⁵

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Sota sebagai instrumen kebijakan publik dalam kerangka diplomasi ekonomi perbatasan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus di wilayah PLBN Sota, Kabupaten Merauke. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, serta dianalisis menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PLBN Sota tidak hanya berfungsi sebagai fasilitas administratif, tetapi juga sebagai ruang kebijakan hibrida yang mempertemukan intervensi negara dengan praktik ekonomi masyarakat lokal. Aktivitas perdagangan lintas batas yang berlangsung secara informal mencerminkan praktik diplomasi ekonomi berbasis masyarakat (*people-to-people diplomacy*) yang berkelanjutan. Dalam konteks ini, UMKM lokal berperan sebagai aktor non-negara yang menjembatani interaksi ekonomi antara Indonesia dan Papua New Guinea, sekaligus berkontribusi dalam membangun hubungan bilateral di tingkat akar rumput. Namun demikian, pengelolaan PLBN masih menghadapi tantangan berupa lemahnya koordinasi antarinstansi, dominasi pendekatan keamanan, serta belum optimalnya integrasi kebijakan terhadap aktivitas ekonomi lokal yang bersifat informal. Penelitian ini menawarkan perspektif baru dengan menempatkan PLBN sebagai ruang kebijakan publik yang bersifat dinamis dan multidimensional, sehingga memerlukan pendekatan yang lebih integratif antara aspek keamanan, ekonomi, dan diplomasi.

Kata Kunci: **PLBN Sota, diplomasi ekonomi, kebijakan publik, perbatasan, UMKM**

ABSTRACT

This study aims to analyze the management of the Sota Cross-Border Post (PLBN) as a public policy instrument within the framework of border economic diplomacy. This study uses a qualitative approach with a case study method in the Sota PLBN area, Merauke Regency. Data were collected through observation, in-depth interviews, and documentation, and analyzed using the interactive model of Miles, Huberman, and Saldana. The results show that the Sota PLBN functions not only as an administrative facility but also as a hybrid policy space that brings together state intervention and local community economic practices. Informal cross-border trade activities reflect the ongoing practice of people-to-people diplomacy. In this context, local MSMEs play a role as non-state actors bridging economic interactions between Indonesia and Papua New Guinea, while contributing to building bilateral relations at the grassroots level.

However, PLBN management still faces challenges such as weak inter-agency coordination, the dominance of a security approach, and suboptimal policy integration with informal local economic activities. This research offers a new perspective by positioning the PLBN as a dynamic and multidimensional public policy space, thus requiring a more integrative approach between security, economic, and diplomatic aspects.

Keywords: *PLBN Sota, Economic Diplomacy, Public Policy, Borders, MSMes*

PENDAHULUAN

Wilayah perbatasan dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) semakin memperoleh perhatian strategis, terutama seiring meningkatnya dinamika hubungan dengan negara tetangga seperti Malaysia, Papua New Guinea (PNG), dan Timor Leste. Perbatasan tidak lagi dipahami semata sebagai garis pemisah teritorial, melainkan sebagai konstruksi sosial-politik yang terbentuk melalui proses historis, diskursif, dan kesepakatan politik yang memisahkan sekaligus menghubungkan komunitas dengan latar belakang sosial dan kultural yang sama (Kolossoff & Scott, 2013). Dalam praktiknya, kawasan perbatasan sering kali dipersepsikan sebagai wilayah pinggir yang identik dengan keterbelakangan, ketidakstabilan, serta berbagai persoalan keamanan, sehingga cenderung terpinggirkan dalam agenda pembangunan nasional (Pramono, 2025). Namun demikian, dalam perspektif kontemporer, kawasan perbatasan justru memiliki posisi strategis sebagai ruang interaksi ekonomi, sosial, dan politik yang berpotensi memperkuat hubungan antarnegara.

Dalam perbatasan Indonesia–PNG, dinamika sosial dan ekonomi masyarakat lokal menjadi bagian integral dari pengelolaan wilayah. Masyarakat yang mendiami kawasan perbatasan, khususnya Suku Kanume dan Marind-Kanum, memiliki keterikatan sosial dan kultural yang melintasi batas negara. Mobilitas penduduk dari Sota (Indonesia) ke wilayah PNG dan sebaliknya tidak hanya didorong oleh faktor ekonomi, tetapi juga oleh hubungan kekerabatan, budaya, dan kedekatan geografis (Nasir, 2020). Kondisi ini menunjukkan bahwa perbatasan tidak hanya berfungsi sebagai batas administratif, tetapi juga sebagai ruang interaksi yang dinamis dan saling terhubung. Salah satu bentuk interaksi lintas batas yang menonjol adalah kegiatan sosial budaya, khususnya kunjungan keluarga dan partisipasi dalam upacara adat. Setiap tanggal 17 Agustus, masyarakat Kampung Sota mengundang warga PNG melalui kepala suku etnis Kanume untuk mengikuti peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia (Rusmiyati et al., 2022). Sebaliknya, pada tanggal 16 September, masyarakat Kampung Sota juga menghadiri peringatan kemerdekaan PNG di wilayah PNG. Tradisi saling mengunjungi dalam momentum hari kemerdekaan ini telah berlangsung selama bertahun-tahun dan menjadi praktik sosial yang menguatkan hubungan kekerabatan lintas batas (Rusmiyati et al., 2022).

Interaksi sosial budaya lintas batas tersebut secara langsung maupun tidak langsung mendorong terbentuknya aktivitas ekonomi masyarakat. Kegiatan perdagangan lintas batas, baik melalui transaksi jual beli maupun sistem barter, menjadi praktik yang umum dilakukan di pasar perbatasan Sota. Aktivitas ini mencerminkan adanya hubungan ekonomi yang bersifat saling melengkapi (*complementary relationship*) antara masyarakat Indonesia dan PNG, sekaligus menunjukkan bahwa praktik ekonomi informal memiliki peran penting dalam menopang kehidupan masyarakat perbatasan. Dalam konteks ini, aktivitas ekonomi tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pemenuhan kebutuhan, tetapi juga sebagai medium interaksi sosial yang memperkuat kohesi lintas batas.

Seiring dengan pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Sota di Kabupaten Merauke, peran kawasan perbatasan semakin diperkuat sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru. PLBN tidak hanya berfungsi sebagai fasilitas keimigrasian dan pengamanan, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan publik yang dirancang untuk mendorong aktivitas ekonomi, memperkuat interaksi sosial lintas negara, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Namun demikian, keberadaan PLBN belum sepenuhnya mampu mengoptimalkan potensi ekonomi perbatasan (Tambajong et al., 2024). Aktivitas perdagangan lintas batas masih didominasi oleh praktik informal, sementara koordinasi antarinstansi dan integrasi kebijakan belum berjalan secara optimal.

Dalam perspektif hubungan internasional, dinamika ini dapat dipahami sebagai bentuk diplomasi ekonomi berbasis masyarakat (*people-to-people diplomacy*), di mana aktor non-negara, seperti pelaku UMKM dan masyarakat lokal, berperan dalam membangun hubungan ekonomi lintas negara secara informal. Pendekatan ini mencerminkan pergeseran dari paradigma *state-centric* menuju *multi-actor approach*, yang menempatkan masyarakat sebagai agen penting dalam proses diplomasi ekonomi di tingkat lokal.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah mengkaji pengelolaan kawasan perbatasan dari berbagai perspektif. Tuakara (2025) menyoroti lemahnya sinergi lintas sektor dalam tata kelola perbatasan yang masih bersifat sektoral dan belum terintegrasi secara sistemik. Sementara itu, Simbiak (2025) menunjukkan bahwa instrumen Pas Lintas Batas (PLB) dan Kartu *Traditional Border Crossing* (TBC) berperan signifikan dalam memfasilitasi mobilitas masyarakat serta memperkuat hubungan bilateral Indonesia–PNG. Lobo et al. (2026) menambahkan bahwa meskipun pengelolaan PLBN telah memiliki dasar regulasi yang jelas, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti dominasi aktivitas ekonomi informal dan keterbatasan kapasitas masyarakat dalam memenuhi persyaratan administratif. Temuan tersebut diperkuat oleh penelitian Dzawanda et al. (2025) yang menunjukkan bahwa aktivitas perdagangan lintas batas informal merupakan fenomena dominan di berbagai wilayah perbatasan global dan berperan penting dalam

menopang ekonomi masyarakat lokal, meskipun sering kali belum terakomodasi secara optimal dalam kebijakan formal. Selain itu, Karim et al. (2024) menekankan bahwa keterlibatan aktor non-negara dalam kerja sama lintas batas mencerminkan berkembangnya praktik *paradiplomacy*, di mana interaksi ekonomi dan sosial masyarakat berkontribusi dalam memperkuat hubungan antarnegara di tingkat lokal.

Meskipun demikian, penelitian tersebut cenderung fokus pada aspek tata kelola, regulasi, dan mobilitas lintas batas, serta belum secara komprehensif mengkaji PLBN sebagai ruang interaksi antara kebijakan publik dan praktik diplomasi ekonomi berbasis aktor non-negara. Selain itu, kajian mengenai peran aktivitas ekonomi informal dalam membentuk dinamika diplomasi ekonomi di tingkat lokal masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan perspektif baru dengan menempatkan PLBN sebagai ruang kebijakan publik yang bersifat hibrida, di mana intervensi negara berinteraksi dengan praktik ekonomi masyarakat dalam membentuk dinamika diplomasi ekonomi perbatasan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-analitis. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai pengelolaan PLBN Sota sebagai instrumen kebijakan publik dalam konteks praktik diplomasi ekonomi perbatasan. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini mampu mengungkap makna, pola interaksi, serta dinamika kebijakan yang berkembang dalam kehidupan sosial-ekonomi masyarakat perbatasan yang tidak dapat dijelaskan secara kuantitatif.

Lokasi penelitian berada di kawasan PLBN Sota, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan. Penentuan informan dilakukan dengan teknik *purposive sampling*, yaitu memilih subjek berdasarkan tingkat keterlibatan dan pengetahuan terhadap aktivitas sosial, ekonomi, dan kelembagaan di wilayah perbatasan. Subjek penelitian berjumlah 10 orang, meliputi kepala kampung Sota sebanyak 1 orang, kepala Distrik Sota sebanyak 1 orang, kepala PLBN Sota sebanyak 1 orang, tokoh adat suku Marind-Kanum sebanyak 1 orang, dan masyarakat suku Marind-Kanum yang tinggal di Indonesia sebanyak 3 orang dan yang tinggal di PNG sebanyak 3 orang.

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi lapangan, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis menggunakan model analisis interaktif Miles et al. (2020), yang mencakup tiga tahapan utama, yaitu kondensasi data (*data condensation*), penyajian data (*data display*), serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing and verification*). Dalam proses analisis, peneliti juga melakukan proses pengkodean data secara bertahap (*open coding* dan *axial coding*) untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang berkaitan dengan kebijakan publik, diplomasi ekonomi perbatasan, dan peran aktor non-negara.

Keabsahan data diuji melalui teknik triangulasi, baik triangulasi sumber maupun triangulasi teknik pengumpulan data. Selain itu, validitas penelitian juga diperkuat melalui uji kredibilitas (*credibility*), keteralihan (*transferability*), ketergantungan (*dependability*), dan kepastian (*confirmability*). Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan menghasilkan temuan empiris yang valid dan mampu memberikan kontribusi konseptual terhadap kajian kebijakan publik dan diplomasi ekonomi di wilayah perbatasan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

PLBN Sota sebagai Instrumen Kebijakan Publik di Wilayah Perbatasan

Perubahan besar terhadap struktur dan dinamika ekonomi lokal di Sota terjadi dengan masuknya peran negara secara intensif melalui program pembangunan kawasan perbatasan. Salah satu tonggak penting dari perubahan ini adalah pendirian dan peresmian Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Sota pada tahun 2021. PLBN Sota menempati posisi yang sangat strategis di ujung timur Indonesia. Letaknya berada sekitar 80 km dari pusat Kota Merauke, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan. Pos ini bukan hanya sekadar fasilitas pemeriksaan lintas batas, melainkan juga simbol kedaulatan negara yang menjadi etalase pembangunan nasional. Di dalam kerangka politik luar negeri, Sota dipandang sebagai “pintu depan” Indonesia yang berhadapan langsung dengan kawasan Melanesia.



Gambar 1. Peta Lokasi PLBN Sota

Pembangunan PLBN Sota modern membawa dampak signifikan terhadap dinamika sosial-ekonomi masyarakat perbatasan. “*PLBN ini bukan cuma bangunan untuk jaga perbatasan, tapi simbol negara hadir di ujung timur*” (Wawancara dengan Bapak RM, 2025). Masyarakat Sota, khususnya suku Marind, tetap mempertahankan relasi kekerabatan dengan komunitas di PNG yang tercermin dalam kunjungan keluarga, partisipasi dalam ritual adat, serta aktivitas perdagangan di pasar perbatasan. Interaksi ini menunjukkan bahwa perbatasan tidak hanya berfungsi sebagai batas administratif, tetapi juga sebagai ruang sosial yang hidup dan dinamis.

Sebelum diresmikannya kompleks PLBN modern pada tahun 2021, aktivitas perdagangan berlangsung secara informal melalui sistem barter maupun transaksi langsung di pasar darurat. Setelah PLBN beroperasi, pemerintah mulai mengarahkan aktivitas ekonomi ke jalur formal dengan menyediakan fasilitas perdagangan yang lebih tertata. *“Dulu pasar agak sepi, cuma orang lokal. Tapi sekarang kalau hari pasar bisa ramai karena warga PNG datang bawa barang...”* (Wawancara dengan Kepala Kampung Sota, 2025). Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan akses pasar lintas negara secara legal dan aman bagi produk lokal. Meskipun implementasinya masih terbatas, keberadaan PLBN memberikan kerangka kelembagaan bagi pengembangan ekonomi perbatasan serta mendorong transformasi dari ekonomi tradisional menuju sistem yang lebih terstruktur. Selain berfungsi sebagai pusat aktivitas ekonomi, PLBN Sota juga berperan dalam penguatan diplomasi budaya. Penyelenggaraan festival perbatasan yang melibatkan komunitas Indonesia dan PNG menjadi sarana mempererat hubungan sosial lintas negara sekaligus memperkenalkan identitas budaya lokal ke ranah yang lebih luas. Dengan demikian, PLBN tidak hanya berfungsi secara administratif, tetapi juga memiliki dimensi sosial dan kultural yang strategis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi di sekitar PLBN Sota sebagian besar digerakkan oleh masyarakat lokal melalui perdagangan harian dan pasar perbatasan. Pola pertukaran komoditas antara masyarakat Indonesia dan PNG menciptakan hubungan saling ketergantungan yang berkontribusi terhadap stabilitas sosial dan ekonomi kawasan. Namun demikian, pengelolaan PLBN belum sepenuhnya optimal, yang ditandai dengan dominasi aktivitas ekonomi informal serta lemahnya koordinasi antarinstansi. Keberhasilan implementasi kebijakan ekonomi tidak hanya bergantung pada penyediaan infrastruktur, tetapi juga pada sinergi antara pemerintah dan pelaku ekonomi lokal. Kerja sama yang baik antara pemerintah dan pelaku UMKM menjadi faktor penting dalam mendorong keberlanjutan aktivitas ekonomi masyarakat (Antu et al., 2021). PLBN Sota berfungsi sebagai ruang kebijakan publik yang bersifat hibrida, di mana intervensi negara (top-down) berinteraksi dengan praktik ekonomi masyarakat (bottom-up). Hal ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum sepenuhnya mampu mengakomodasi dinamika lokal masyarakat perbatasan.

Salah satu informan menyatakan bahwa peningkatan aktivitas ekonomi pasca pembangunan PLBN belum diikuti dengan koordinasi yang memadai: *“Sekarang orang dari PNG lebih sering masuk untuk belanja, tapi pedagang lokal masih berjalan sendiri-sendiri tanpa arahan yang jelas”* (Wawancara Tokoh Masyarakat Sota, 2025). Hal ini menunjukkan masih lemahnya mekanisme kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam pengelolaan kawasan perbatasan. Tulie et al. (2025) berpendapat kurangnya koordinasi, lemahnya desain kelembagaan, dan ego sektoral sering menjadi hambatan dalam mewujudkan tata kelola pembangunan yang efektif. Tuakara (2025) juga menyoroti

adanya fragmentasi kebijakan dan lemahnya sinergi lintas sektor dalam pengelolaan kawasan perbatasan di Indonesia. Meskipun negara telah menghadirkan infrastruktur dan regulasi formal, dinamika ekonomi di lapangan tetap didominasi oleh inisiatif masyarakat lokal. Di sisi lain, peningkatan aktivitas perdagangan lintas batas menunjukkan adanya hubungan ekonomi yang berkelanjutan dan tidak lagi bersifat insidental, didukung oleh perbaikan infrastruktur dan kelancaran distribusi barang. Namun, berbagai kendala masih dihadapi, seperti keterbatasan kapasitas masyarakat dan belum optimalnya integrasi kebijakan ekonomi lokal. Hal ini konsisten dengan temuan Lobo et al. (2026) yang menegaskan adanya tantangan struktural dalam pengelolaan PLBN, khususnya dalam mengakomodasi aktivitas ekonomi masyarakat yang cenderung informal. Secara teoritis, kondisi ini memperkuat pemahaman bahwa PLBN Sota merupakan ruang kebijakan hibrida yang mempertemukan kepentingan negara dengan dinamika sosial-ekonomi lokal dalam pengelolaan kawasan perbatasan.

Praktik Diplomasi Ekonomi Perbatasan melalui Aktivitas Perdagangan Lintas Batas

Aktivitas perdagangan lintas batas di kawasan PLBN Sota dapat dipahami sebagai bentuk konkret diplomasi ekonomi yang berlangsung secara informal. Berbeda dengan diplomasi konvensional yang dijalankan oleh aktor negara melalui jalur resmi, praktik diplomasi ekonomi di wilayah ini justru tumbuh dari interaksi langsung antar masyarakat yang didorong oleh kebutuhan ekonomi, kedekatan geografis, serta ikatan sosial-budaya. “*Kita ini saudara, bukan cuma tetangga negara...*” (Wawancara dengan Tokoh Adat Marind-Kanume, 2025). Pernyataan tersebut mencerminkan bahwa hubungan lintas batas tidak semata-mata dibatasi oleh garis negara, melainkan dibangun atas dasar kedekatan kultural dan historis. Aktivitas perdagangan lintas batas tidak hanya menjadi aktivitas ekonomi, tetapi juga menjadi medium diplomasi yang bersifat sosial dan kultural. Temuan ini sejalan dengan penelitian Simbiak (2025) yang menyatakan bahwa instrumen seperti Pas Lintas Batas (PLB) dan Kartu *Traditional Border Crossing* (TBC) tidak hanya berfungsi secara administratif, tetapi juga berperan sebagai sarana diplomasi adaptif dalam memperkuat hubungan bilateral Indonesia–PNG. Umar et al. (2025) menambahkan bahwa nilai-nilai lokal seperti gotong royong, saling menghormati, dan solidaritas sosial dapat menjadi fondasi penting dalam membangun hubungan kolaboratif serta meningkatkan efektivitas praktik pelayanan dan interaksi sosial dalam masyarakat. Sehingga, kerangka formal yang disediakan negara justru berinteraksi dengan praktik informal masyarakat, menghasilkan bentuk diplomasi yang hibrid.

Lebih lanjut, pertukaran komoditas antara masyarakat Indonesia dan PNG menunjukkan adanya pola hubungan ekonomi yang bersifat saling melengkapi (*complementary relationship*). Ketergantungan terhadap barang tertentu dari masing-masing wilayah menciptakan kepentingan bersama yang secara tidak langsung

berkontribusi terhadap stabilitas kawasan perbatasan. Fenomena serupa juga ditemukan di wilayah perbatasan Indonesia–Malaysia, di mana kebijakan pemerintah Malaysia yang memberikan kemudahan perdagangan lintas batas memungkinkan masyarakat membawa barang dalam jumlah tertentu tanpa bea cukai. Kebijakan tersebut mempermudah akses terhadap kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau serta meminimalkan hambatan birokrasi (Sari, 2016; Syafri & Al-Amin, 2025). Dalam konteks ini, aktivitas ekonomi lintas batas tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pemenuhan kebutuhan, tetapi juga sebagai instrumen sosial yang memperkuat kohesi dan interdependensi antar masyarakat di wilayah perbatasan.

Selain itu, praktik perdagangan yang berlangsung secara rutin menunjukkan bahwa diplomasi ekonomi di kawasan perbatasan memiliki karakter berkelanjutan (*sustained interaction*), bukan sekadar interaksi insidental. Intensitas pertemuan yang tinggi antar masyarakat mendorong terbentuknya kepercayaan (*trust-building*) yang menjadi fondasi penting dalam hubungan lintas negara. “Kita biasa tunggu keluarga dari PNG kalau hari pasar... kita bisa ngobrol, saling tanya kabar. Itu yang bikin dekat.” (Wawancara dengan Mama MD, 2025). Interaksi semacam ini memperkuat argumen bahwa masyarakat perbatasan berperan sebagai agen diplomasi informal melalui mekanisme *people-to-people diplomacy*, yang melengkapi bahkan dalam beberapa aspek memperkuat diplomasi formal antarnegara. Kehadiran PLBN Sota juga turut meningkatkan intensitas mobilitas orang dan barang lintas batas, sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat lokal, khususnya dalam perdagangan kebutuhan pokok. Infrastruktur ini berfungsi sebagai katalis yang mempercepat interaksi ekonomi sekaligus memperluas ruang praktik diplomasi ekonomi berbasis masyarakat.

Banyaknya praktik ekonomi informal menunjukkan adanya keterbatasan dalam integrasi kebijakan formal. Meskipun negara telah menyediakan kerangka regulasi, implementasi di lapangan belum sepenuhnya mampu mengakomodasi karakteristik lokal, seperti praktik barter dan penggunaan mata uang non-resmi. “*Kami tidak melarang barter, tapi kami pastikan tidak ada barang terlarang atau satwa dilindungi yang ditukar.*” (Wawancara dengan Kepala PLBN, 2025). Pernyataan ini menunjukkan adanya pendekatan kebijakan yang bersifat pragmatis dan adaptif, namun sekaligus mengindikasikan belum optimalnya integrasi antara regulasi formal dan praktik ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan kebijakan yang lebih fleksibel dan kontekstual, yang mampu menjembatani kebutuhan masyarakat dengan kepentingan negara. Karena penguatan kelembagaan, kepemimpinan yang visioner, serta pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan merupakan prasyarat penting bagi terciptanya pembangunan yang responsif dan berkelanjutan (Tulie et al., 2025). Dalam perspektif diplomasi ekonomi, kondisi ini menegaskan adanya pergeseran dari pendekatan *state-centric* menuju keterlibatan aktor non-negara. Masyarakat perbatasan,

melalui aktivitas ekonomi sehari-hari, tidak hanya berperan sebagai pelaku ekonomi, tetapi juga sebagai agen diplomasi informal yang secara berkelanjutan membangun dan memelihara hubungan bilateral di tingkat akar rumput.

Peran UMKM Lokal sebagai Aktor Non-Negara dalam Diplomasi Ekonomi

UMKM lokal di kawasan PLBN Sota menunjukkan peran strategis tidak hanya sebagai penggerak ekonomi perbatasan, tetapi juga sebagai aktor non-negara dalam praktik diplomasi ekonomi. Aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh pelaku UMKM menjadi medium utama dalam membangun interaksi lintas batas antara masyarakat Indonesia dan PNG. Sebagaimana diungkapkan oleh salah satu informan: “*Dulu pasar agak sepi, cuma orang lokal. Tapi sekarang kalau hari pasar bisa ramai...*” (Wawancara dengan Kepala Kampung Sota, 2025) Peningkatan aktivitas pasar tersebut mengindikasikan adanya intensifikasi interaksi ekonomi lintas negara. Hal ini diperkuat oleh praktik perdagangan langsung yang dilakukan oleh masyarakat kedua negara: “*Kalau hari pasar, banyak orang PNG datang. Kami biasa tukar barang. Mereka bawa ikan asap, kami kasih gula atau sabun,*” (Wawancara dengan Mama MR, 2025). Temuan ini menunjukkan bahwa UMKM tidak hanya berfungsi sebagai penyedia barang dan jasa, tetapi juga sebagai penghubung (*economic bridge*) yang memfasilitasi hubungan ekonomi informal antarnegara. Dalam perspektif ekonomi politik, fenomena ini mencerminkan pergeseran dari pendekatan *state-centric* menuju pendekatan *multi-actor*, di mana aktor non-negara memiliki kontribusi signifikan dalam membentuk dinamika hubungan internasional di tingkat lokal.

Lebih lanjut, aktivitas perdagangan yang dilakukan UMKM secara tidak langsung berkontribusi dalam membangun citra ekonomi Indonesia di mata masyarakat PNG. Interaksi yang berulang dan berbasis kepercayaan menciptakan bentuk diplomasi ekonomi yang bersifat organik, informal, dan berbasis komunitas. Fenomena ini sejalan dengan konsep *informal cross-border trade* yang banyak ditemukan di kawasan Afrika dan Asia, di mana pelaku usaha kecil memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi lokal sekaligus memperkuat hubungan lintas batas (Lesser & Moisé-Leeman, 2009; Yang, 2025). Dari sisi strategi bertahan, UMKM di kawasan ini menunjukkan kemampuan adaptasi yang tinggi terhadap berbagai keterbatasan struktural, seperti akses distribusi dan minimnya dukungan kebijakan formal. Strategi tersebut umumnya berbasis pada jaringan sosial dan pengalaman empiris: “*Kalau kita tahu minggu depan hari pasar, kita simpan dulu barang yang biasa mereka cari. Sudah hafal apa yang mereka mau.*” (Wawancara dengan Mama LN, 2025). Pernyataan ini mengindikasikan adanya mekanisme pasar berbasis pengetahuan lokal (*local knowledge*) yang berkembang secara informal. Selain itu, kedekatan geografis dan hubungan kekerabatan lintas batas menjadi modal sosial penting yang memungkinkan UMKM tetap bertahan dan berkembang dalam kondisi yang terbatas.

Dampak ekonomi dari aktivitas ini juga dirasakan secara langsung oleh pelaku UMKM, khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan rumah tangga: “*Sekarang bisa bayar sekolah anak dari hasil jualan,*” (Wawancara dengan Mama MR, 2025). Hal ini menunjukkan bahwa UMKM tidak hanya berperan dalam skala makro sebagai bagian dari diplomasi ekonomi, tetapi juga memiliki kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat lokal (Purba et al., 2025). Lebih jauh, pola interaksi yang terbangun menunjukkan adanya ketergantungan ekonomi timbal balik antara masyarakat perbatasan Indonesia dan PNG. Kondisi ini sejalan dengan temuan Nasir (2020) yang menyatakan bahwa interaksi ekonomi di wilayah perbatasan dipengaruhi oleh keterkaitan faktor sosial, ekonomi, dan geografis, sehingga membentuk hubungan yang adaptif dan dinamis.

Hasil penelitian ini juga mengungkap sejumlah keterbatasan. UMKM di kawasan PLBN Sota masih belum terintegrasi secara optimal dalam kebijakan formal pemerintah dan cenderung beroperasi secara individual. Ketidadaan kerangka kebijakan yang inklusif berpotensi menghambat optimalisasi peran UMKM sebagai aktor strategis dalam diplomasi ekonomi perbatasan. Oleh karena itu, diperlukan intervensi kebijakan yang lebih komprehensif dan inklusif, yang tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi, tetapi juga memperhatikan dimensi sosial dan kultural masyarakat perbatasan. Integrasi UMKM ke dalam strategi diplomasi ekonomi nasional dapat menjadi langkah penting dalam memperkuat posisi Indonesia di kawasan perbatasan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal.

Implikasi Kebijakan dan Integrasi Pengelolaan PLBN

Meskipun PLBN Sota telah menunjukkan fungsi strategis dalam mendorong aktivitas ekonomi dan diplomasi perbatasan, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaannya menghadapi berbagai tantangan, khususnya dominasi pendekatan keamanan dalam kebijakan perbatasan. Akibatnya, dimensi ekonomi dan diplomasi belum sepenuhnya terinstitusionalisasi secara optimal. Temuan ini memperkuat argumentasi bahwa pengelolaan kawasan perbatasan memerlukan pendekatan yang terintegrasi antara aspek keamanan, ekonomi, dan sosial-budaya. Hal ini sejalan dengan pandangan Kolossov dan Scott (2013) yang menyatakan bahwa perbatasan merupakan ruang sosial yang kompleks dan dinamis, bukan sekadar garis teritorial. Selain itu, Sohn (2014) juga menekankan bahwa keberhasilan pembangunan kawasan perbatasan sangat bergantung pada kemampuan negara dalam mengintegrasikan kebijakan lintas sektor serta melibatkan aktor lokal dalam proses pembangunan. Dalam konteks PLBN Sota, integrasi tersebut dapat diwujudkan melalui penguatan koordinasi antarinstansi, pemberdayaan UMKM, serta pengembangan kebijakan yang adaptif terhadap dinamika sosial-ekonomi masyarakat perbatasan. Dengan demikian, optimalisasi peran PLBN Sota sebagai instrumen kebijakan publik tidak hanya bergantung pada pembangunan

infrastruktur fisik, tetapi juga pada kemampuan negara dalam mengelola interaksi sosial, ekonomi, dan diplomasi secara holistik dan berkelanjutan. Berdasarkan temuan tersebut, diperlukan langkah kebijakan yang lebih konkret, antara lain: (1) penguatan koordinasi lintas instansi, (2) penyederhanaan regulasi perdagangan lintas batas, dan (3) pemberdayaan UMKM sebagai aktor utama ekonomi perbatasan.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa PLBN Sota tidak hanya berfungsi sebagai fasilitas administratif, tetapi juga sebagai ruang kebijakan publik yang bersifat hibrida, di mana intervensi negara berinteraksi dengan praktik ekonomi masyarakat lokal. Aktivitas perdagangan lintas batas yang berkembang di kawasan ini mencerminkan praktik diplomasi ekonomi informal berbasis masyarakat (*people-to-people diplomacy*) yang berlangsung secara berkelanjutan dan berkontribusi terhadap stabilitas sosial-ekonomi kawasan perbatasan. Temuan penelitian ini menegaskan bahwa UMKM lokal berperan sebagai aktor non-negara yang tidak hanya menjalankan fungsi ekonomi, tetapi juga menjadi agen diplomasi yang menjembatani hubungan ekonomi antara Indonesia dan PNG di tingkat akar rumput. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran dari pendekatan *state-centric* menuju pendekatan *multi-actor* dalam praktik diplomasi ekonomi di wilayah perbatasan.

Namun demikian, pengelolaan PLBN Sota masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait lemahnya koordinasi antarinstansi, dominasi pendekatan keamanan, serta belum optimalnya integrasi kebijakan terhadap aktivitas ekonomi lokal yang cenderung informal. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan kebijakan yang lebih integratif dan kontekstual, yang tidak hanya berfokus pada aspek keamanan, tetapi juga mengakomodasi dimensi ekonomi dan sosial masyarakat perbatasan. Secara konseptual, penelitian ini memberikan kontribusi dengan menempatkan PLBN sebagai ruang interaksi antara kebijakan publik dan diplomasi ekonomi berbasis aktor non-negara, sehingga memperkaya kajian mengenai pengelolaan kawasan perbatasan dalam perspektif multidimensional.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas kajian mengenai peran PLBN sebagai ruang interaksi antara negara dan masyarakat dengan meninjau dinamika ekonomi lintas batas secara lebih komprehensif. Kajian lanjutan dapat dilakukan dengan membandingkan pengelolaan PLBN Sota dengan PLBN lain di wilayah perbatasan Indonesia guna mengetahui perbedaan pola kebijakan, tingkat partisipasi masyarakat, serta efektivitas diplomasi ekonomi berbasis lokal dalam konteks sosial dan geografis yang berbeda. Selain itu, penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan *mixed methods* atau penelitian longitudinal agar dapat menggambarkan perubahan aktivitas ekonomi lintas batas secara lebih mendalam dan berkelanjutan. Sehingga dapat

menghasilkan gambaran deskriptif dan mampu mengukur dampak kebijakan PLBN terhadap kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Antu, Y., Mohi, E. H., Nggilu, R., Arsana, I. K. S., Binolombangan, F., & Endey, N. (2021). Analisis Implementasi Kebijakan Ekonomi dan Implikasinya terhadap UMKM di Kota Gorontalo. *Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik*, 8(2), 230–237. <https://doi.org/10.37606/publik.v8i2.231>
- Dzawanda, B., Matsa, M. M., Gumbo, E. B., Runokunda, J. C., & Nicolau, M. D. (2025). A Systematic Review of Informal Cross-Border Trade in African Economies Towards Vision 2030. *Discover Sustainability*, 7(1), 84. <https://doi.org/10.1007/s43621-025-02443-8>
- Karim, M. F., Mursitama, T. N., Riyadi, S. F., Affandi, R. A., & Muzdalifa, F. (2024). Informality, Paradiplomacy, and Cross-Border Cooperation: The Development of Tourism on Bintan Island, Indonesia. *Asian Studies Review*, 48(2), 370–388. <https://doi.org/10.1080/10357823.2023.2259080>
- Kolossov, V., & Scott, J. (2013). Selected Conceptual Issues in Border Studies. *Belgeo*, (1). <https://doi.org/10.4000/belgeo.10532>
- Lesser, C., & Moisé-Leeman, E. (2009). *Informal Cross-Border Trade and Trade Facilitation Reform in Sub-Saharan Africa* (OECD Trade Policy Papers No. 86; OECD Trade Policy Papers, Vol. 86). <https://doi.org/10.1787/225770164564>
- Lobo, F. N., Arman, Y., & Soro, E. T. G. (2026). Pengelolaan Pos Lintas Batas Negara Sebagai Upaya Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Napan Ditinjau Dari Perspektif Hukum. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(1), 2894–2900.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2020). *Qualitative Data Analysis* (4th edn). Sage Publications.
- Nasir, A. (2020). Buletin Ekonomi. *Ekonomi*, 18(2), 261–286.
- Pramono, B. (2025). *Penjaga Kedaulatan: Membangun Kekuatan di Beranda Depan Negeri Fokus pada Peran Pertahanan dan Pembangunan di Wilayah Perbatasan*. CV. Aksara Global Akademia.
- Purba, D. T., Ningrum, W., Dalimunte, A., Ginting, M. M., & Hasibuan, R. R. A. (2025). Peran Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (umkm) Dalam Pengembangan Ekonomi Indonesia. *International, Journal of Islamic Business Management (IJMBS)*, 4(4), 226–238.
- Rusmiyati, Faridah, M., Alma'arif, & Nooraini, A. (2022). *Manajemen Perbatasan* (Cetakan Pertama). CV Cendekia Press.

- Sari, I. P. (2016). Ketergantungan Masyarakat Perbatasan Indonesia Kepada Malaysia 1 (studi Kasus: Desa Badau, Kecamatan Badau, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat). *Baabu Al-Ilmi*, 1(2), 129–143.
- Simbiak, H. T. (2025). Pemakaian Pas Lintas Batas (PLB) dan Kartu Traditional Boarding Cross (TBC) Sebagai Instrumen Diplomasi dalam Hubungan Indonesia-Papua Nugini di Era Presiden Joko Widodo. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 5(6), 4841–4855.
- Sohn, C. (2014). Modelling Cross-Border Integration: The Role of Borders as a Resource. *Geopolitics*, 19(3), 587–608. <https://doi.org/10.1080/14650045.2014.913029>
- Syafri, M., & Al-Amin. (2025). Ketergantungan Ekonomi Masyarakat Perbatasan Indonesia terhadap Produk Malaysia: Kajian Pustaka atas Faktor Penyebab dan Dampaknya. *JEBIMAN: Jurnal Ekonomi, Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi*, 3(4), 299–306.
- Tambajong, H., Oja, H., & Meisaroh, Y. (2024). Manajemen Kolaborasi Pemangku Kepentingan Dalam Pengelolaan Wilayah Perbatasan Pada PBLN Sota. *Societas: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Sosial*, 13(2), 376–385.
- Tuakara, Y. (2025). Tata Kelola Perbatasan yang Berkelanjutan: Sinergi Lintas Sektor untuk Pembangunan dan Keamanan di Merauke. *Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(4), 1356–1368.
- Tulie, E., Aneta, A., Aneta, Y., & Sulila, I. (2025). Dinamika Collaborative Governance dalam Proses Perencanaan Pembangunan di Provinsi Gorontalo. *Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik*, 12(1).
- Umar, N. A., Aneta, A., Kasim, N. M., & Hamim, U. (2025). Reformasi Administrasi Publik: Mengintegrasikan Nilai-Nilai Lokal untuk Motivasi PNS di Gorontalo. *Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik*, 12(1).
- Yang, J. (2025). Employment Insecurity as a Driver of Informal Cross-Border Trade: A Case Study of the China–Kazakhstan Border. *Journal of Central Asian Studies*, 23(4). <https://doi.org/10.52536/3006-807X.2025-4.005>